

ABSTRAK

Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi. Dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g peraturan tersebut dinyatakan bahwa “Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan memiliki fungsi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya”. Berdasarkan latar belakang yang ada dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam mengelola permukiman kumuh yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi? dan apa saja kendala yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan pengelolaan permukiman kumuh di Kota Bekasi?

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang kemudian pada hasil penelitian dijabarkan dengan deskriptif analitis dilengkapi dengan data sekunder, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan wawancara sebagai bahan penunjang dalam penulisan ilmiah ini.

Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam mengelola permukiman kumuh di Kota Bekasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab untuk mengelola kawasan kumuh di Kota Bekasi, merehabilitasi rumah yang tidak layak huni, pengendalian lingkungan, menyediakan lahan untuk konstruksi, dan menyediakan layanan pemakaman yang meliputi kesehatan perumahan dan permukiman, konstruksi, penyuluhan, pendataan, perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, investasi, pembebasan lahan, penyelesaian konflik/masalah, dan pemakaman. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam mengelola permukiman kumuh akan dilakukan pemetaan wilayah permukiman kumuh yang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara khusus dalam pengelolaan permukiman kumuh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tentu menghadapi baik kendala internal maupun kendala eksternal yang dapat menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan dalam mengelola permukiman kumuh.

Kata Kunci: Permukiman, Monitoring dan Evaluasi, Dinas, Kota Bekasi